



**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA
MALANG**

(Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh
SAYYIDA AMALIA
NPM 21901091063



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kemiskinan di Indonesia masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia. Dalam mewujudkan kebijakan Program Keluarga Harapan, pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH) Undang-Undang No. 140 tentang jaminan sosial, keputusan preseiden No.3 Tahun 2010 tentang program-program pembangunan yang adil dan keputusan No. 15 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang ini masih belum optimal dikarenakan alat bayar keluarga penerima manfaat (KPM) yang bermasalah, masih cukup tingginya angka kemiskinan di Kota Malang, jumlah yang diterima tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki, banyak warga miskin yang belum tersentuh bantuan, perubahan mental/mindset masyarakat penerima bantuan dan sistem terbaru dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) banyak peserta yang dikeluarkan by sistem tanpa konfirmasi.

Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan mengevaluasi bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Malang.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:16), yaitu teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program dikatakan kurang efektif. Dari hasil analisis bahwa proses pencairan dana program keluarga harapan tersebut sudah berjalan cukup baik, Kecukupan program keluarga harapan menunjukkan belum cukup mengatasi masalah yang ada. Kebijakan program keluarga harapan sejauh ini warga Kota Malang sudah mencapai 80% yang telah mendapatkan bantuan PKH dari jumlah penerima bantuan 10.656 ribu jiwa. Responsivitas Terhadap Kebijakan Program Keluarga Harapan ini diterima dengan baik oleh Masyarakat, karena bantuan tersebut juga sangat bermanfaat bagi Masyarakat kurang mampu. Bahwasannya ketepatan program keluarga harapan ini belum tepat dikarenakan Masyarakat belum sepenuhnya menerima bantuan. Faktor-faktor pendukung Faktor pendukung dalam pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kota Malang yaitu adanya koordinasi rutin, adanya sumber daya yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta partisipasi dari Masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Malang yaitu alat bayar keluarga penerima manfaat yang bermasalah, jumlah bantuan tidak sesuai.

Kata kunci : *Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan*

SUMMARY

Poverty is a concern of the central government and regional governments. Because poverty in Indonesia is still the main focus regarding the government's efforts to improve Indonesia's social welfare. In realizing the Family Hope Program policy, the government created the Family Hope Program (PKH) Law no. 140 concerning social security, presidential decree NO. 3 of 2010 concerning fair development programs and decision no. 15 challenges to accelerate poverty alleviation. The Family Hope Program (PKH) in Malang City is still not optimal because the means of payment for beneficiary families (KPM) is problematic, the poverty rate is still quite high in Malang City, the amount received does not match the components they have, many poor people have not been touched. assistance, changes in the mental/mindset of the people receiving aid and the latest system of integrated social welfare data (DTJS) for many participants which were released by the system without confirmation.

The Family Hope Program (PKH) in Malang City is still not optimal because the means of payment for beneficiary families (KPM) is problematic, the poverty rate is still quite high in Malang City, the amount received does not match the components they have, many poor people have not been touched. assistance, changes in the mental/mindset of the people receiving aid and the latest system of integrated social welfare data (DTJS) for many participants which were released by the system without confirmation.

In this research, the research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The approach model used in this research is the interactive model from Miles, Huberman and Saldana (2014: 16), namely the data analysis technique is the process of arranging the sequence of data, organizing it into patterns, categories and basic units of description.

The results of this research indicate that the program is said to be less effective. From the results of the analysis, the process of disbursing funds for the Family Hope Program has gone quite well and has adjusted the components for each participant. The adequacy of the Family Hope program shows that it is not enough to overcome existing problems. The family hope program policy has been implemented evenly among the community, so far 80% of Malang City residents have received PKH assistance out of a total of 10,656 thousand aid recipients. Responsiveness to the Family Hope Program Policy was well received by the community, because this assistance is also very beneficial for underprivileged communities. That the accuracy of this family of hope program is correct Supporting factors Supporting factors in alleviating poverty through the family of hope program in Malang City are the existence of routine coordination, the existence of quality resources, adequate facilities and infrastructure, as well as participation from the community. The inhibiting factors in implementing the family hope program in Malang City are problematic means of payment for beneficiary families, the amount of aid is not appropriate, and the latest system.

Keywords: Policy Evaluation, Family Hope Program(PKH), Poverty

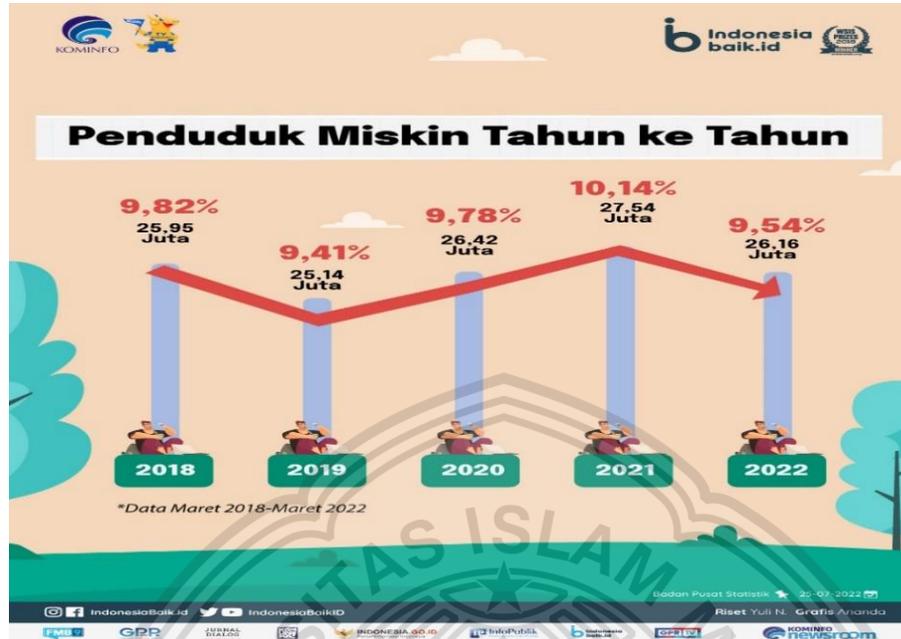
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan negara adalah cita-cita bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan Makmur (Slamet, 2013). Indikator kesejahteraan itu adalah salah satu kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji. Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka kemiskinan pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia adalah 278 juta jiwa, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Maka permasalahan kemiskinan pada tahun 2022 di Indonesia bisa dikatakan menurun seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 1 Jumlah Dan Presentase Kemiskinan Di Indonesia



Sumber: Badan Statistik Indonesia, 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwasannya angka kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun dengan melihat kondisi di Negara. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82 persen atau 25,95 juta jiwa. Untuk tahun selanjutnya tahun 2019 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,41 persen atau 25,14 juta jiwa. Hal itu merupakan angka kemiskinan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 9,78 persen atau 26,42 juta jiwa. Hal itu dikarenakan adanya musibah yang dihadapi oleh Negara seperti halnya covid 19 yang mengakibatkan warga Negara Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaannya. Namun, ditahun 2021 masalah kemiskinan di Indonesia semakin meningkat sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Hal itu disebabkan karena wabah virus covid 19 yang semakin meningkat yang

mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Kemudian ditahun 2022, kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Di jelaskan dalam Pasal 1 bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, Pemerintah Indonesia telah memiliki banyak program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia ada dua strategi, diantaranya yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan diberbagai sektor perekomomian. Kedua, dengan melakukan sebuah pelatihan kepada masyarakat miskin agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dalam mewujudkan cita-cita bangsa agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015)

Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial, memerlukan suatu program perlindungan sosial yang terencana, teratah dan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial Memberikan Bantuan Keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dari untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Program keluarga Pemerintah Indonesia mulai menerapkan Harapan (PKH) pada tahun 2007. Tujuan PKH adalah untuk meringankan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, meninggalkan generasi kemudian dari kemiskinan. PKH juga mendukung tercapainya tujuan Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Program ini dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. Dalam program perlindungan sosial tersebut diambil pemerintah Indonesia sebagai salah satu langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat diatur dalam Undang-undang No. 140 Tahun 2014 tentang jaminan sosial, keputusan presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program-program pembangunan yang adil dan keputusan No. 15 tentang percepatan pengetasan kemiskinan. Maka dari itu untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek, salah

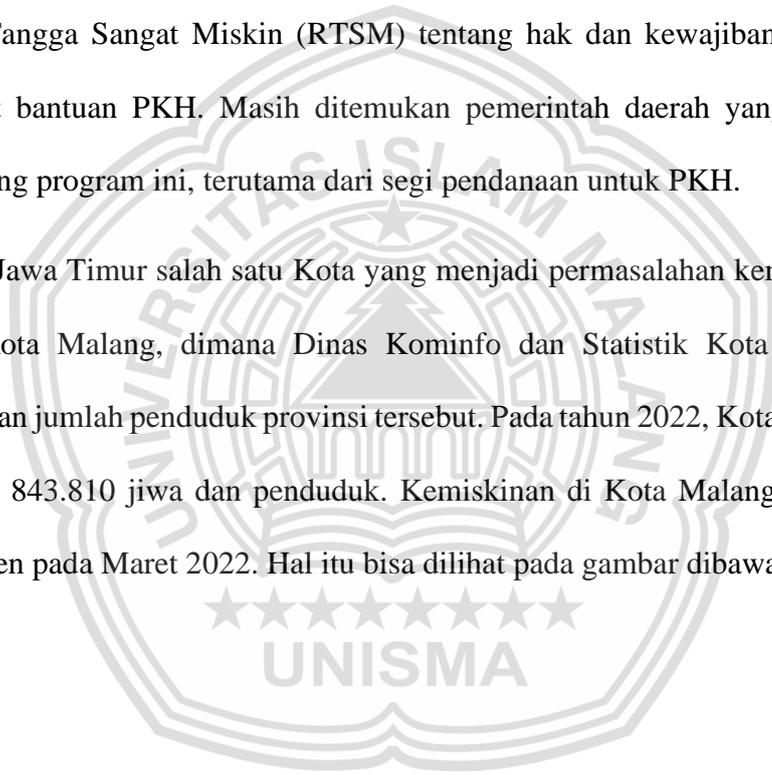
satunya aspek sosial, pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berkomitmen mengentaskan kemiskinan namun program tersebut masih banyak ditemukan permasalahan.

Permasalahan program PKH di Indonesia ini salah satunya yaitu maladministrasi PKH oleh Lembaga pengawasan pelayanan publik, data akurasi penerima PKH jadi keluarga yang layak menerima bantuan PKH sedangkan keluarga yang tidak layak, ternyata tidak menerima bantuan dan lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan penerima bantuan PKH. (Tempo.co, 2019). Bahwasanya permasalahan diatas terjadi banyak diseluruh Indonesia, lemahnya pengawasan menjadikan Program Keluarga Harapan bantuan ini tidak sesuai sasaran yang semestinya.

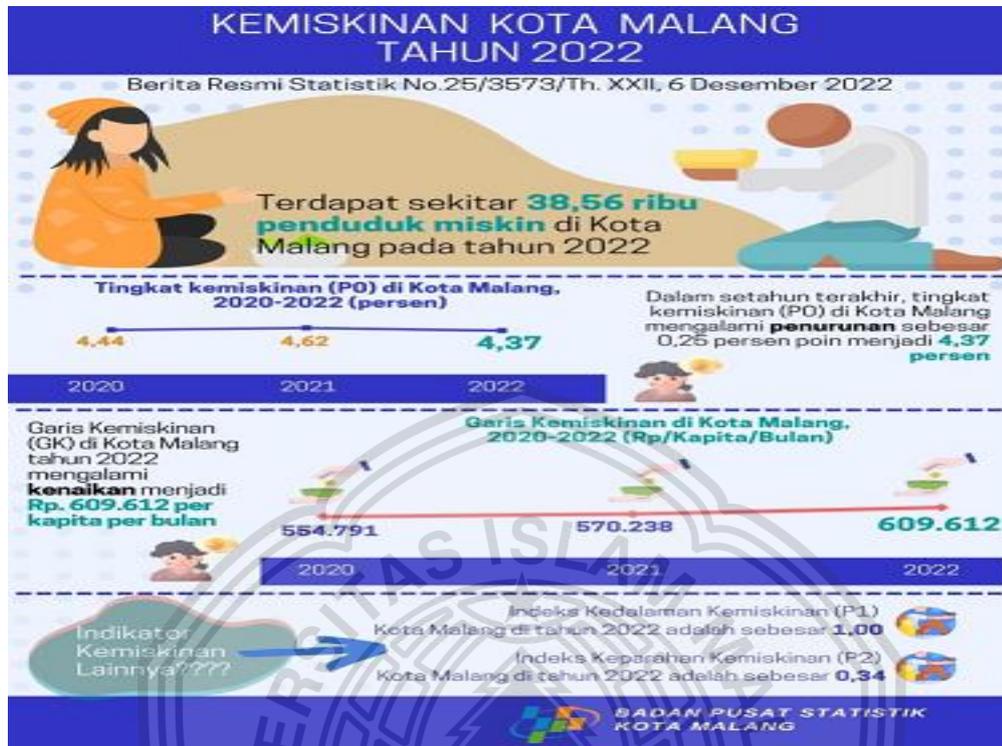
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, dari total 37 juta penduduk di Jatim tercatat 7,13 juta penduduk tergolong miskin. Sebagian besar yaitu 4,57 juta atau 64% berada di wilayah pedesaan dan umumnya sebagai buruh tani. Sedangkan sisanya berada di wilayah perkotaan yang mayoritas sebagai buruh informal. Dari angka tersebut 7,13 juta penduduk miskin menjadi sasaran dalam Program Keluarga Harapan yang ada di Jatim. Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, Dinsos Jatim, Drs Bawon Adi Itoni Msi, menjelaskan bahwa Provinsi Jatim mendapat jatah hasil konfirmasi dengan unit pelaksana program PKH pusat namun masih dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pos. Dijelaskan bahwa pencairan dana PKH dilakukan tiga tahap dalam satu tahun. Diharapkan beberapa lokasi yang belum mendapat program tersebut agar tahun berikutnya

diprioritaskan. Dengan bantuan dana PKH diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional anak sekolah seperti kebutuhan transportasi. Ada beberapa kendala dari PKH yang sudah berlangsung di Jatim, seperti soal pendistribusian form validasi pada fasilitas kesehatan (faskes) dan Pendidikan. Selain itu, masih terdapat lemahnya pengawasan terhadap kinerja pendamping. Sehingga ditemukan beberapa kelemahan, seperti kurangnya pemahaman dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tentang hak dan kewajiban apabila mendapat bantuan PKH. Masih ditemukan pemerintah daerah yang belum mendukung program ini, terutama dari segi pendanaan untuk PKH.

Di Jawa Timur salah satu Kota yang menjadi permasalahan kemiskinan adalah Kota Malang, dimana Dinas Kominfo dan Statistik Kota Malang melaporkan jumlah penduduk provinsi tersebut. Pada tahun 2022, Kota Malang mencapai 843.810 jiwa dan penduduk. Kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,37 persen pada Maret 2022. Hal itu bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 2 Kemiskinan Di Kota Malang Pada Tahun 2022



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Malang 2022

Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Malang pemerintah berusaha mengurangi angka kemiskinan dengan memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH mendorong KPM untuk memiliki akses untuk menggunakan layanan sosial dasar untuk kesehatan, Pendidikan, gizi, perawatan dan dukungan termasuk akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya. Data dari Dinas Sosial Kota Malang jumlah keluarga penerima PKH di Malang mencapai 6.336 KPM. Namun, PKH di Malang masih ditemukan masalah seperti halnya kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan program, kurangnya sumber daya pendamping, penggunaan dana bantuan yang tidak semestinya, pendamping PKH menggelapkan dana bantuan/korupsi.

Dalam pelaksanaan PKH, peran dinas sosial adalah sebagai operator Keberhasilan PKH. Manajemen kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat meningkatkan atau meningkatkan keterampilan mereka untuk bertindak secara sosial dan menciptakan kondisi bagi masyarakat yang memungkinkannya mencapai tujuan.

Dalam mewujudkan kebijakan Program Keluarga Harapan, pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 sehubungan dengan penanggulangan kemiskinan. Seperti dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1. Kebijakan telah mencapai waktu yang lama sehingga dibutuhkan evaluasi kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan karena melihat sejak kebijakan ini diterbitkan ditahun 2018 hingga sekarang masih banyak masyarakat miskin yang ada di Kota Malang. Sehingga ini butuh evaluasi terhadap kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan ataupun program tertentu, sehingga menentukan langkah yang diambil dimasa yang akan datang. Menurut Subarsono (2016:119), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut William N Dunn (2003:158) dengan indikator-indikator yang mempengaruhi evaluasi kebijakan publik yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Namun, pada faktanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang ini masih belum optimal dikarenakan yang Pertama, kurangnya sumber

daya pendamping atau sumber daya PKH. Kedua, masih cukup tingginya angka kemiskinan di Kota Malang. Ketiga, penyaluran program yang tidak merata. Keempat, kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan program. Kelima, penggunaan dana bantuan yang tidak semestinya/tidak tepat sasaran. (Kompas.com, 2021). Dari latar belakang diatas peneliti berfokus pada beberapa point, diantaranya yaitu:

1. Alat bayar keluarga penerima manfaat (KPM) yang bermasalah.
2. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dikota malang.
3. Jumlah yang diterima tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki.
4. Banyak warga miskin yang belum tersentuh bantuan.
5. Perubahan mental/*mindseat* Masyarakat penerima bantuan.
6. Sistem terbaru dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) banyak peserta yang dikeluarkan by sistem tanpa adanya konfirmasi.

Dari problematika diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan melihat kebijakan program keluarga harapan. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh peneliti diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang akan dijawab nantinya pada hasil dan pembahasan penelitian.

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang mengenai evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang.

- b. Dapat memberikan masukan bagi pembaca dan pengembangan peneliti serupa.
- c. Penelitian ini diharapkan agar peneliti juga dapat lebih memahami teori-teori yang dipelajari selama di perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang.

2. Manfaat secara praktis:

a. Peneliti

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi berjalan program keluarga harapan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang.

b. Instansi

Manfaat yang didapat oleh pihak pegawai Dinas Sosial Kota Malang sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar program bisa lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Universitas

Mendapatkan hasil riset dari penelitian ini terkait masalah atau keadaan di lapangan, agar kedepannya dapat menjadi pengembangan kurikulum.

d. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat agar bisa memberikan informasi tentang kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait evaluasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang selama sepuluh tahun sejak 2013 dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik akan tetapi belum mencapai pada kata maksimal. Hal ini dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan. Adapun juga dalam evaluasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang ditemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Malang. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Malang

1) Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan

Ditemukan bahwasannya efektivitas dari evaluasi kebijakan program keluarga harapan di Kota Malang yang ditinjau dari kegiatan yang dilaksanakan dan hasil dari kegiatan program, dapat dikatakan kurang efektif, Bantuan program keluarga harapan dinilai masih belum mampu mengurangi kemiskinan dan masih diiringi dengan beberapa permasalahan baru yaitu timbulnya alat bayar keluarga penerima manfaat yang bermasalah yaitu ATM yang terblokir dan buku tabungan yang hilang. Sering kali Masyarakat tidak segera mengurus sehingga

bantuannya tidak terserap. Kemudian hampir semua peserta selalu hadir dalam kegiatan P2K2, tetapi terdapat beberapa peserta tertentu yang sering tidak hadir.

2) Efisiensi Pada Kebijakan Program Keluarga Harapan

Dari hasil analisis bahwa proses pencairan dana program keluarga harapan tersebut sudah berjalan cukup baik dan menyesuaikan komponen dari masing-masing peserta. Akan tetapi masih ditemukan beberapa masalah yakni Masyarakat belum tau tentang rincian dana yang harus mereka terima setiap pencairan dana, mereka harus diberikan informasi-informasi tentang prosedur penerimaan bantuan tersebut. Jadi dinilai dari aspek efisiensi kebijakan program keluarga harapan di Kota Malang. Maka kata efisien masih belum mampu dicapai sepenuhnya karena masih banyak ditemukan Masyarakat yang menerima dana belum sesuai dengan komponen yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut komponen yang dimiliki oleh masing-masing penerima manfaat berbeda-beda yakni Ibu hamil, balita, Pendidikan anak SD, Pendidikan anak SMP, Pendidikan anak SMA, Lansia, Penyandang disabilitas.

3) Kecukupan Program Keluarga Harapan

Ditemukan bahwasannya pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan kecukupan kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan belum cukup mengatasi masalah yang ada, karena masih belum dapat menyelesaikan masalah keuangan keluarga.

4) Perataan Kebijakan Program Keluarga Harapan

Kebijakan program keluarga harapan sejauh ini warga Kota Malang yang telah mendapatkan bantuan PKH dari jumlah penerima bantuan 10.656 ribu jiwa. Dari angka tersebut penerima bantuan paling banyak penerima yakni dari kelurahan tanjungrejo daerah sukun. Akan tetapi, masih banyaknya juga warga yang kurang mampu belum menerima bantuan dikarenakan kuota Kota Malang sendiri juga terbatas. Menanggapi akan hal itu, Dinas Sosial masih tetap peduli dengan warga yang berada digaris kemiskinan. Jadi dinilai dari aspek perataan kebijakan program keluarga harapan di Kota Malang ini masih belum cukup dikatakan merata. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa Masyarakat tergolong kurang mampu belum mendapatkan bantuan.

5) Responsivitas Terhadap Kebijakan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan hasil analisis, bahwasannya respon positif dari Masyarakat penerima bantuan merasa sangat puas dan terbantu dengan adanya program keluarga harapan ini. Bahwa responsivitas dari program ini sangat diterima dengan baik oleh Masyarakat, karena bantuan tersebut juga sangat bermanfaat bagi Masyarakat kurang mampu.

6) Ketepatan Kebijakan Program Keluarga Harapan

Bahwasannya ketepatan program keluarga harapan ini menunjukkan bahwa program keluarga harapan ini belum tepat karena Masyarakat penerima bantuan belum sepenuhnya bermanfaat untuk

peserta. Hal tersebut dikarenakan peserta PKH masih enggan untuk memanfaatkan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan cara melalui kewirausahaan. Padahal jika Masyarakat mampu merubah pola pikir menjadi lebih maju, mereka akan berusaha memanfaatkan bantuan yang diterima agar kemudian bisa menambah pendapatan keluarga. Dengan demikian, mereka bisa segera keluar dari garis kemiskinan.

b) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di Kota Malang

1) Faktor-faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kota Malang yaitu adanya koordinasi rutin, adanya sumber daya yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta partisipasi dari Masyarakat.

2) Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Malang yaitu alat bayar keluarga penerima manfaat yang bermasalah, penerima manfaat belum menerima alat bayar, jumlah bantuan tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki, masih banyak warga yang kurang mampu belum menerima bantuan, perubahan mental/*mindseat* Masyarakat penerima bantuan, dan yang terakhir yaitu sistem terbaru dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) peserta PKH banyak yang dikeluarkan by sistem tanpa adanya konfirmasi.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang mungkin dapat peneliti berikan dan bermanfaat bagi pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Malang ialah sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas Sosial Kota Malang Lebih mengoptimalkan sistem pendataan yang terbaru dan akurat berdasarkan pada pedoman dan syarat yang berlaku agar tujuan dari program keluarga harapan dapat tercapai dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan agar bisa membantu mengurangi kemiskinan.
- 2) Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait dengan sistem alat bayar keluarga penerima manfaat yang sering terjadinya kesalahan agar tidak terjadinya miss komunikasi antara pihak Dinas Sosial dan peserta penerima bantuan PKH.
- 3) Memberikan informasi seperti halnya prosedur-prosedur yang akurat terkait dengan pencairan dana yang diterima oleh peserta PKH agar Masyarakat mengetahui rincian yang diberikan.
- 4) Masyarakat harus melengkapi data-datanya untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan sehingga Masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ishartono, Santoso Tri Raharjo. *Sustainable Developments Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. *Social Work Jurnal*, Vol 6 (No 2): 159
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong. Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 2000. *Ekonomi Rakyat dan program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta

Jurnal:

- Anwar, F., & Untari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(1), 11-17.

Darmadi, D., Yusuf, D. A. P., Firnanda, Y. A. Y., & Nathanie, R. W. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 806-818.

Humairoh, U., & Utomo, S. J. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BANGKALAN. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 1(2).

Mahmud, F., & Mustari, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 17-33.

Sari, A. G., & Marom, A. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan Dan Kesehatan Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 17-29.

Dokumen Resmi Negara:

Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program-program pembangunan yang adil Keputusan No. 15 tentang percepatan pengetasan kemiskinan

Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 tentang program PKH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

UU No. 140 Tahun 2014 tentang jaminan sosial

Website:

Badan Pusat Statistik. 2022. Presentase Penduduk Miskin Perpulau di Indonesia. Maret. BPS Indonesia. Jakarta.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur (2009). <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/19075#:~:text=Ini%20dilakukan%20dua%20hari%20di%202021%20lokasi%20C%20dari,program%20PKH%20di%20Jatim%20tahun%20ini%20terbilang%20sukses.> (Diakses pada 17 Maret 2023)

Radar Malang Jawa Pos (2022). Kemiskinan di Malang Raya Masih Tinggi. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kota-malang/24/07/2022/kemiskinan-di-malang-raja-masih-tinggi/>. (Diakses pada 16 Februari 2023)

Setyo Puji (2021). Pengakuan Pendamping PKH Yang Korupsi Rp 450 Juta, Untuk Beli Motor Dan Perabot Rumah tangga. <https://regional.kompas.com/image/2021/08/09/190742878/pengakuan->

[pendamping-pkh-yang-korupsi-rp-450-juta-uangnya-untuk-beli-motor?page=1.](#)

(Diakses pada 19 Maret 2023)

Mardi Sampurno (2022). 80 persen bantuan Pendidikan program keluarga harapan.

<https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811086602/80-persen-bantuan-pendidikan-program-keluarga-harapan> (Diakses pada 20 Agustus 2023)

Pipit Anggraeni (2019). Ratusan KK di Kota Malang dicoret dari daftar keluarga penerimamanfaatPKH.

<https://www.malangtimes.com/baca/41906/20190722/134700/ratusan-kk-di-kota-malang-dicoret-dari-daftar-keluarga-penerima-manfaat-pkh> (Diakses pada 20 Agustus 2023)

